



## Dewan Siap Lanjutkan Temuan BPK

**MENINDAKLANJUTI** Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2014, DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia kerja (panja).

Meskipun telah disepakati pembentukan panja dalam rapat pimpinan gabungan (Rapingab), Senin 13 Juli 2015, hingga kini dewan belum menunjukkan tanda-tanda bakal dimulainya kerja panja.

Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengaku, panja dalam waktu dekat akan mulai bekerja untuk menindaklanjuti LHP BPK. Pasalnya surat keputusan (SK) untuk anggota panja segera diterbitkan pekan ini. "SK turun, dan kita mulai kerja," ujar dia.

Namun Prabowo belum bisa memberikan anggota fraksi mana saja yang bakal masuk dalam susunan panja itu. Bahkan untuk ketua panja pun masih belum ditentukan. "Untuk ketuanya juga belum ditentukan," tegas dia.

Seperti diketahui, dalam pasal 6 huruf a Permendagri Nomor 13 tahun 2010, panja paling lama dibentuk dua pekan setelah menerima LHP BPK. Adapun masa tugas panja sebagaimana diatur pasal 6 huruf b Permendagri yang ditandatangani pada 27 Januari 2010 itu adalah satu minggu.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran 2014, BPK memberikan opini atau penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga menuai respon dari kalangan politisi di Kebon Sirih, lalu menindaklanjutinya dengan pembentukan panja.

Opini WDP juga merupakan hasil dari berbagai persoalan atau permasalahan di tahun 2013 yang belum tuntas ditindaklanjuti. Selain sejumlah permasalahan di tahun 2014, seperti pengendalian dan pengamanan aset senilai Rp 3,5 triliun serta pencatatannya, permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat ditelusuri rincian dan kelemahan sistem pengendalian belanja modal atas 85 paket pekerjaan pengadaan barang. (pes)